

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang Konstruksi menjadi bagian penting terhadap keberlangsungan pembangunan di Republik Indonesia. Pada akhir tahun 2019, sebuah penyakit yang bernama *Corona Virus Disease* (Covid-19) muncul pertama kali di salah satu wilayah Indonesia yang membuat negara ini mengalami pandemi dalam hal ini terkenal dengan namanya yaitu Pandemi Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan masifnya penyebaran berita pada berbagai *platform* media pada awal tahun 2020 mengenai wabah Covid-19 yang membuat sebagian besar aktivitas masyarakat baik di Indonesia hingga manca negara terhenti sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran hingga memutus rantai wabah tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, dampak dari pandemi tersebut signifikan terhadap keberlangsungan segala bidang yang ada, tak terkecuali teruntuk Bidang Konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung merupakan satuan kerja penyelenggara pemerintah yang memiliki proses bisnis mayoritas yakni melaksanakan berbagai proyek konstruksi di lingkup Kota Bandar Lampung. Dengan adanya wabah Covid-19, Dinas PU mengikuti peraturan-peraturan mulai dari peraturan daerah hingga peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR). Berbagai program terkait konstruksi serta infrastruktur dilaksanakan selama Pandemi Covid-19 dan menjadi prioritas yang diharapkan menjadi salah satu langkah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Berkaitan dengan itu, Pandemi Covid-19 yang merupakan kejadian luar biasa (KLB) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan konstruksi yang mayoritas interaksi dilakukan di lapangan. Lebih lanjut jika berbicara mengenai proyek konstruksi, maka terminologi *triple constraint*¹ akan terus melekat. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul meliputi berbagai macam seperti interaksi lapangan, proses pengawasan, serta potensi kurangnya pemasok material bahan bangunan akibat adanya program pemerintah berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19 ini, dengan berlandaskan dan mengacu pada himbauan presiden dan peraturan-peraturan terkait untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, dimohonkan terhadap Menteri PUPR untuk dilakukan pemberhentian terkait proyek konstruksi. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian PUPR telah mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Menteri PUPR Nomor 02 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Triyawan & Fendayanti (2021) menyatakan bahwa langkah pemberhentian sementara terkait proyek ini merupakan salah satu langkah nyata serta pertimbangan bagi pemerintah mengenai

¹ *Triple Constraint* (biaya, mutu, waktu) merupakan parameter penting bagi penyelenggara proyek. Ketiga batasan tersebut saling tarik-menarik (Natalia et al., 2021).

pemutusan rantai mata virus Covid-19. Berdasarkan peristiwa pemberhentian sementara terkait proyek tersebut, yang dapat dijadikan fokus utama terkait biaya adalah apabila konstruksi tersebut dibiayai dari pinjaman, dalam hal ini sesuai dengan peristiwa *force majeure* yaitu Pandemi Covid-19, PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan telah menjelaskan bahwa biaya pinjaman tersebut tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode bersangkutan.

Perlu kita ketahui dan/atau pahami bersama, kegiatan konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrikal (Triyawan & Fendayanti, 2021). Sedangkan itu, sesuai dengan bahasan kali ini, konstruksi dalam pengerjaan yang selanjutnya disingkat KDP merupakan aset yang diklasifikasikan sebagai aset tetap yaitu diantaranya menurut PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu, sedang dalam proses pembangunan dan belum selesai. Peraturan terkait yaitu PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan menyebutkan bahwa tujuan standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan juga menyebutkan bahwa masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui

sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

Peneliti menentukan fokus penelitian pada bagaimana pencatatan konstruksi dalam pengerjaan yang dimulai dari perolehan hingga reklasifikasi menjadi aset tetap terkait. Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan di atas, dengan segala keterbatasan peneliti atas informasi terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan pemerintah daerah yaitu Dinas PU Kota Bandar Lampung, peneliti tertarik untuk meninjau terkait penerapan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada pemerintah daerah tersebut dalam pembagian waktu sebelum dan saat Pandemi Covid-19 dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan atas Penerapan PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PU Kota Bandar Lampung Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang hendak dijawab dalam Karya Tulis Tugas Akhir kali ini:

1. Bagaimana penganggaran terkait konstruksi dalam pengerjaan sebelum dan saat Pandemi Covid-19 pada Dinas PU Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana pelaksanaan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebelum dan saat Pandemi Covid-19 pada Dinas PU Kota Bandar Lampung ?
3. Apakah terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PU Kota Bandar Lampung ?

4. Bagaimana kesesuaian antara pelaporan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PU Kota Bandar Lampung dengan kebijakan dan/atau peraturan terkait ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir kali ini:

1. Untuk mengetahui penganggaran terkait konstruksi dalam pengerjaan sebelum dan saat Pandemi Covid-19 pada Dinas PU Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebelum dan saat Pandemi Covid-19 pada Dinas PU Kota Bandar Lampung.
3. Untuk mengidentifikasi terkait kendala serta hambatan dalam pelaksanaan/praktik Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PU Kota Bandar Lampung.
4. Untuk meninjau kesesuaian antara pelaporan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PU Kota Bandar Lampung dengan kebijakan dan/atau peraturan terkait.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pada karya tulis tugas akhir (KTTA) kali ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitiannya terkait Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan melakukan tinjauan tersebut hanya pada Dinas PU Kota Bandar Lampung, pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Peneliti melakukan pembatasan dengan alasan fokus peneliti hanya pada tahun yang terjadi sebelum dan saat adanya Pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu sumber media yang bermanfaat untuk peneliti pribadi dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti terkait Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pemerintah daerah mulai dari pelaksanaan akuntansi hingga pengungkapannya (pelaporan).

2. Bagi peneliti selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu sumber referensi untuk peneliti lain dalam penelitiannya terkait Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

3. Bagi satuan kerja

Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi yang berguna terhadap satuan kerja mengenai konstruksi dalam pengerjaan saat Pandemi Covid-19 serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi satuan kerja dalam pengambilan keputusan dalam hal Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum serta terminologi-terminologi mengenai objek tinjauan peneliti serta peraturan-peraturan yang relevan yang akan menjadi landasan/basis/dasar dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Pembahasan tersebut terdiri dari dasar/landasan hukum, definisi akuntansi pemerintah, definisi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penjelasan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data terhadap Karya Tulis Tugas Akhir. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan gambaran umum dari Dinas PU Kota Bandar Lampung yang meliputi profil satuan kerja, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur satuan kerja.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjadi bagian terakhir sekaligus bagian penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi simpulan dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PU Kota Bandar Lampung.